



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2020**

BAPPEDA KAB. SINTANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyusun **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2020** sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang serta sesuai dengan Dokumen APBD Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam laporan ini secara umum digambarkan mengenai capaian dari target yang telah direncanakan dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami akan terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, namun disadari pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif cukup lama sampai sistem ini

berjalan sebagaimana mestinya. Saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, Maret 2021
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG



KARTIYUS, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680826 199303 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2020 melaporkan Capaian Kinerja (*Performance Results*) dengan tetap mengacu pada rencana strategis BAPPEDA Kabupaten Sintang Periode 2017-2021. (*Performance Plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sintang dengan capaian 1 (satu) sasaran strategis, dengan capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	140,55%			

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran BAPPEDA Kabupaten Sintang dalam pencapaian visi dan misi pada tingkat Pemerintah Kabupaten. Pengukuran capaian kinerja meliputi pengukuran realisasi 1 (satu) sasaran yang paling berpengaruh capaian sasaran strategis dari 4 (empat) IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Sasaran : Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan	Dokumen	1	3	300 %	Output
2	Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian	Aplikasi	1	1	100 %	Output
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang Dihasilkan	Dokumen	3	2	66,67 %	Output

4	Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD	%	85	81,19	95,51	Output
Capaian Sasaran					140,55 %	

- 1) Capaian Indikator “Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan.” sebesar 300% dengan kategori sangat berhasil.
- 2) Capaian Indikator “Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian” sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil.
- 3) Capaian Indikator “Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan” sebesar 66,67 % dengan kategori sangat berhasil.
- 4) Capaian Indikator “Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD” sebesar 95,51 % dengan kategori sangat berhasil.

Beberapa masalah yang dapat menghambat pencapaian target kinerja sasaran antara lain:

- Masih kurangnya anggaran untuk mengikuti pelatihan teknis bagi setiap ASN di BAPPEDA Kabupaten Sintang (refocusing anggaran).
- Kurangnya kesadaran SKPD untuk menindaklanjuti pentingnya prioritas program dalam perencanaan daerah.
- Refocusing anggaran tahun 2020 berakibat pada pengurangan kegiatan perencanaan teknis.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan langkah-langkah

- Mengalokasikan anggaran secara efisien untuk mengikuti diklat sertifikasi Jabatan maupun diklat struktural dan teknis.
- Menyusun Program Kerja Perencanaan Daerah sesuai dengan skala prioritas.
- Melaksanakan koordinasi dan pemutahiran data perencanaan daerah secara terstruktur dan berkala.
- Pelaksanaan kegiatan teknis dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
-

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2021	16
B. TUJUAN DAN SASARAN	18
C. PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KAB. SINTANG TAHUN 2020.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
B. REALISASI ANGGARAN.....	40
BAB IV PENUTUP.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya Sintang, terletak di antara 1°05' Lintang Utara dan 0°46' Lintang Selatan serta 110°50' Bujur Timur dan 113°20' Bujur Timur. Secara geografis batas administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara Lain, yaitu :

- Utara : berbatasan dengan Serawak, Negara Malaysia, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang.
- Timur : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Kondisi tofografi wilayah Kabupaten Sintang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan yaitu $\pm 62,74$ %, sisanya merupakan daerah dataran rendah, rawa dan atau tergenang musiman, dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 50 – 2.278 meter.

Pada daerah dataran rendah, kondisi air tanah (air permukaan) cukup melimpah namun air tersebut umumnya tidak layak untuk dikonsumsi karena kandungan zat besi (Fe) cukup tinggi.

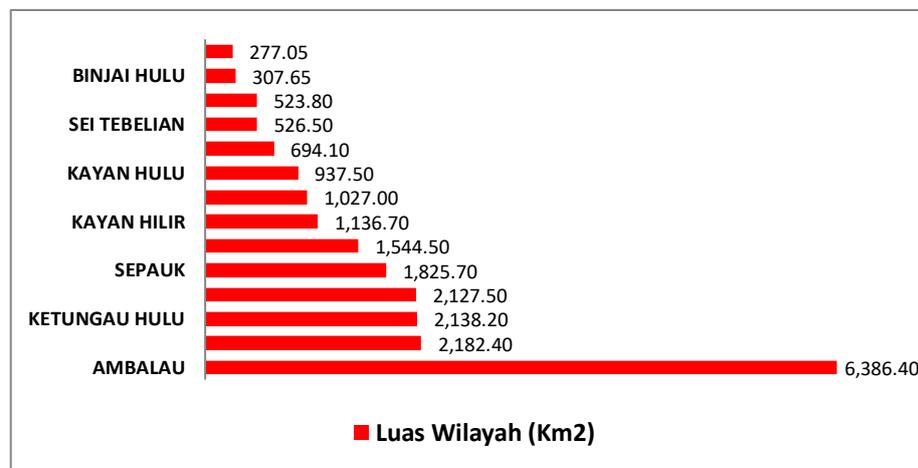
Sedangkan tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 236,76 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan. Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun 2014 terjadi pada bulan Nopember, yaitu mencapai 375,80 milimeter dengan hari hujan sebanyak 19 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu hanya mencapai 78,10 milimeter dengan hari hujan sebanyak 8 hari. Adapun penyinaran matahari berkisar antara 32 persen sampai dengan 79 persen, dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 55,8 persen. Sedangkan rata-rata temperatur udara berkisar antara 26,60°C sampai dengan 27,40°C. Temperatur udara terendah sebesar 22,60°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 33,10°C.

Kabupaten Sintang dihuni penduduk sebanyak 389.911 jiwa (proyeksi tahun 2020), dengan kepadatan rata-rata 18,02 jiwa/km². Komposisinya terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas dari suku Dayak dan Melayu. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah petani sawit dan karet.

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 391 desa. Kecamatan-kecamatanannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kalam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 6.386,40 Km² (29,52%) dari luas Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing–masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Adapun kecamatan terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Sintang, seluas 277,05 Km² (1,28%). Berikut gambar luas wilayah di Kabupaten Sintang :

Gambar 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Sintang



Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten), tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%).

Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Sintang

Menimbang dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih baik, terpadu dan terarah. Atas dasar pertimbangan diatas, maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sejarah atau kronologis pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 1969 dan Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1969, maka keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi KALBAR nomor SK 132/I-A/1 tanggal 28 Agustus 1969 tentang pembentukan Biro Khusus.
3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor SK/044/I-A/1 tanggal 16 April 1970, maka sebutan Biro Khusus di ubah menjadi Badan Pengendalian Operasionil Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor SK 018 tahun 1973 tanggal 17 Januari 1973 membentuk Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat disingkat BAPPEDA.

5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 17 Agustus 1974 nomor 137 tahun 1974 dibentuk Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, disingkat BAPPEDA, Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juli 1974 nomor 142 tahun 1974 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juli 1974 nomor EKBANG 7/39/48.

BAPPEDA dibentuk sebagai Badan Staf yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah yang dengan demikian sekaligus melaksanakan fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta menilai pelaksanaannya.

Untuk melengkapi kepentingan organisasi, maka terbit Keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 11 Januari 1978 tentang Pola Tata Kerja / Pembagian Tugas Bagian dan Sub Bidang pada BAPPEDA.

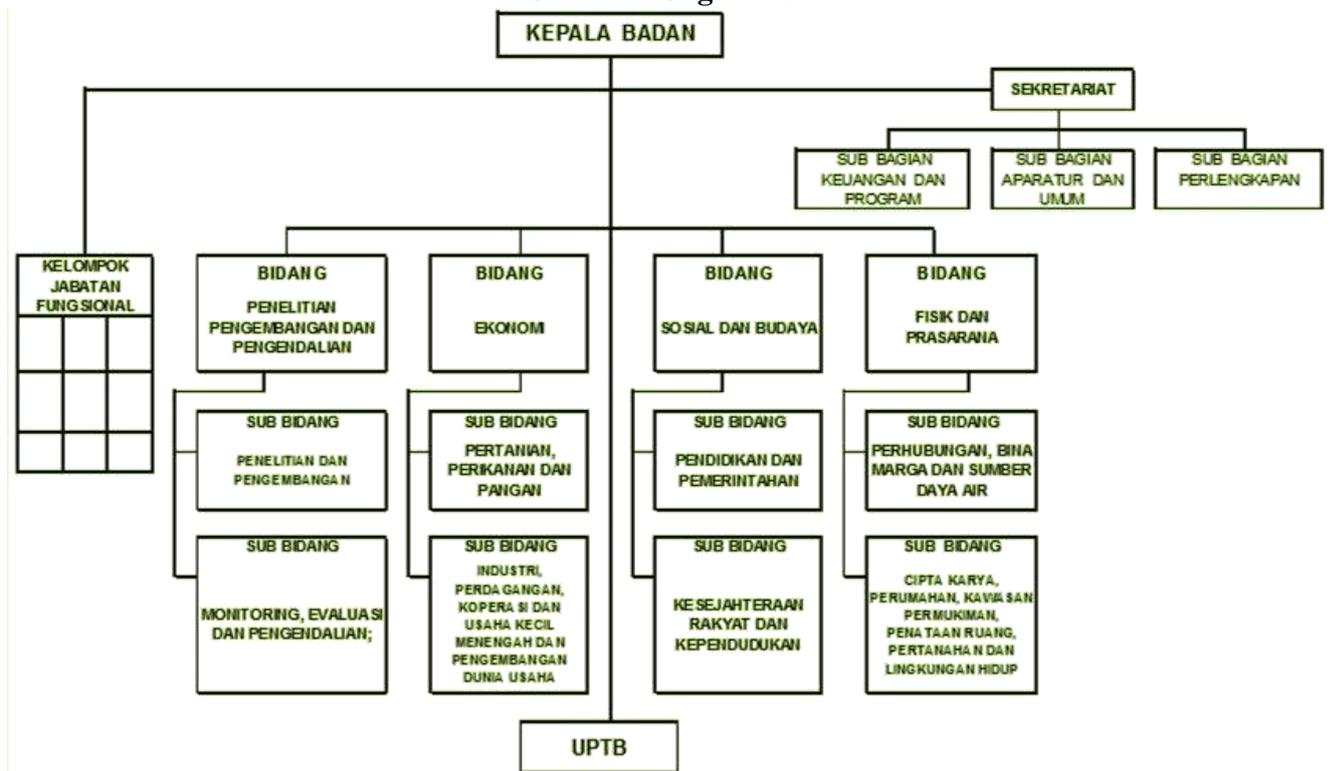
Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat nomor 4 tanggal 29 Juni 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 129 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

2.1 Struktur dan Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Sintang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang nomor 129 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, bahwa Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Sintang, terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum.
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan.
 - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
4. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan.
 - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pengembangan Dunia usaha.
5. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan
6. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perhubungan, Bina Marga dan Sumber Daya Air.
 - b. Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Bappeda Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 51 personil terdiri dari 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 orang tenaga Honorer dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Sintang

No.	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Tenaga Struktural Kepala Badan	1	-	1

2	Sekretaris	1	-	1
3	Sub Bagian Keuangan & Program	1	-	1
4	Sub Bagian Aparatur & Umum	1	-	1
5	Sub Bagian Perlengkapan	1	-	1
6	Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian	1	-	1
7	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	-	1
8	Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	1	-	1
9	Bidang Ekonomi	1	-	1
10	Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan	1	-	1
11	Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pengembangan Dunia usaha	1	-	1
12	Bidang Sosial dan Budaya	1	-	1
13	Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan	1	-	1
14	Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan	1	-	1
15	Bidang Fisik dan Prasarana	1	-	1
16	Sub Bidang Perhubungan, Bina Marga dan Sumber Daya Air	1	-	1
17	Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1	-	1
18	Tenaga Non Struktural (Pendukung	23	-	23

	Operasional)			
19	Pulahta Administrasi Surat	-	1	1
20	Penjaga Malam	-	2	2
21	Tenaga Operator Komputer	-	7	7
22	Pendistribusi Surat	-	1	1
JUMLAH		40	11	51

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Bappeda Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Bappeda telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

No.	NAMA BARANG	JUMLAH (SATUAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tanah bangunan rumah negara gol II	288 M2	KIB A
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	3,403 M2	KIB A
3	Gedung dan Bangunan	14 Unit	KIB C
4	Portable generating set (Genset)	1 Unit	KIB B

5	Transportable water pump/Pompa Air	1	Unit	KIB B
6	Station wagon (Kendaraan Roda Empat)	3	Unit	KIB B
7	Sepeda motor	39	Unit	KIB B
8	Speed boat	2	Unit	KIB B
9	Global positioning system (GPS)	5	Buah	KIB B
10	Mesin ketik manual longwager (18)	2	Buah	KIB B
11	J Scanner	1	Unit	KIB B
12	Filling Cabinet	6	Buah	KIB B
13	Lemari Arsip	5	Buah	KIB B
14	Brankas	1	Buah	KIB B
15	Papan Pengumuman	1	Buah	KIB B
16	White Board	1	Buah	KIB B
17	Lemari Kayu	7	Buah	KIB B
18	Meja Rapat	43	Buah	KIB B
19	Kursi Rapat	216	Buah	KIB B
20	Kursi Tamu	3	Set	KIB B
21	Meja Komputer	2	Buah	KIB B
22	Meja Piket	1	Buah	KIB B
23	Meja ½ Biro	29	Buah	KIB B
24	Sofa	1	Set	KIB B
25	Meja 1 Biro	2	Buah	KIB B
26	Kursi Direksi	5	Buah	KIB B
27	Mesin Potong Rumput	1	Unit	KIB B
28	Alat Penyedot Asap	1	Buah	KIB B
29	Lemari Es	1	Buah	KIB B

30	Ac Unit	15	Buah	KIB B
31	Ac Split	14	Buah	KIB B
32	Televisi	3	Buah	KIB B
33	Sound System	3	Unit	KIB B
34	Unit Power Supply (UPS)	8	Buah	KIB B
35	Camera Digital	3	Buah	KIB B
36	Tangga Alumunium	2	Buah	KIB B
37	Mimbar / Podium	2	Buah	KIB B
38	Komputer PC	5	Unit	KIB B
39	Laptop	27	Buah	KIB B
40	Notebook	11	Buah	KIB B
41	Plotter	2	Unit	KIB B
42	Printer	14	Buah	KIB B
43	Motherboard	4	Buah	KIB B
44	Monitor LCD	4	Buah	KIB B
45	Server	2	Unit	KIB B
46	Netware Interface External	1	Unit	KIB B
47	Bandwich 2 Mbps	1	Unit	KIB B
48	Meja Kerja Pejabat E/III	2	Buah	KIB B
49	Meja Kerja Pejabat E/IV	4	Buah	KIB B
50	Meja Rapat Pejabat E/II	1	Buah	KIB B
51	Meja Rapat Pejabat E/III	3	Buah	KIB B
52	Kursi Kerja Pejabat E/II	1	Buah	KIB B
53	Kursi Kerja Pejabat E/III	1	Buah	KIB B
54	Proyektor & Attachment	5	Buah	KIB B

55	Wireless Mic	3	Buah	KIB B
56	Microphone	6	Buah	KIB B
57	Facsimile	2	Unit	KIB B

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai dua fungsi utama :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

1. Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang meliputi :

- a. belum mampunya menyediakan *standard operating procedure (SOP)* perencanaan;
- b. belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
- c. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
- d. belum tersedianya dokumen strategis perencanaan teknis.

2. Analisis Isu Strategis Bappeda Kabupaten Sintang

Secara internal Bappeda Kabupaten Sintang memiliki Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weakneses*) dan secara eksternal Bappeda Kabupaten Sintang memiliki Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threatment*).

Identifikasi masalah-masalah di lingkungan Bappeda Kabupaten Sintang dianalisis dan dirumuskan atau dijelaskan secara ringkas masing-masing faktor sebagai berikut :

➤ **Kekuatan (*Strenght*)**

BAPPEDA Kabupaten Sintang optimis dalam peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini merujuk dengan potensi yang ada sebagai kekuatan sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Sumber anggaran yang dialokasikan dalam APBD;
- Tersedianya Asosiasi BAPPEDA Seluruh Indonesia;
- Hubungan kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Sintang BAPPEDA Provinsi dan dengan SKPD lain di tingkat Kabupaten;
- Sumber Daya Aparatur yang berpendidikan S1, S2 di lingkungan BAPPEDA dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA;
- Terjalannya hubungan kerja yang harmonis serta koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BAPPEDA sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan BAPPEDA sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- Adanya sarana prasarana perkantoran;

➤ **Kelemahan (*Weakness*)**

- Koordinasi yang terjalin antara BAPPEDA dengan OPD lain belum maksimal dalam proses perencanaan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kesalahpahaman dan tumpang

tindih tugas pokok dan fungsi antar OPD;

- Belum tersedianya data yang sistematis, akurat, komprehensif dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan;
- Kurangnya sarana/prasarana pendukung perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya pengelolaan database dan informasi perencanaan guna menunjang proses perencanaan pembangunan;

➤ **Peluang (*Opportunity*)**

- Tersedianya Sumber Daya Alam yang potensial di wilayah kabupaten Sintang sehingga dapat meningkatkan produktivitas pembangunan secara adil dan merata;
- Letak geografis Kabupaten Sintang yang strategis serta berbatasan langsung dengan negara luar sedikit banyak memberikan kontribusi bagi datangnya investor-investor asing maupun lokal sehingga dapat mempercepat proses pembangunan di kabupaten Sintang;
- Terjalinnnya hubungan kerja sama yang baik antara BAPPEDA dengan lembaga pemerintah lainnya dan universitas setempat maupun lintas kabupaten sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan BAPPEDA;
- Semakin majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan;

➤ **Tantangan (*Constraint*)**

- Derasnya arus globalisasi yang menuntut perubahan secara cepat

sehingga butuh kesiapan dan kemampuan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan;

- Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- Rotasi mutasi pegawai yang cepat mengakibatkan pejabat yang baru perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan tupoksinya yang baru; dan
- Koordinasi yang terjalin antara BAPPEDA dengan OPD lain di tingkat provinsi serta antara BAPPEDA dengan OPD lain di tingkat kabupaten/kota belum maksimal

3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten

Sintang terdapat permasalahan utama (*strategic issued*) yaitu :

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Sintang, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum tersedianya data yang sistematis, akurat, komprehensif dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan
3. Kurang meratanya beban kerja pada bidang- bidang di Bappeda sehingga kinerja Bappeda kurang maksimal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Sintang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan dicapai. Sedangkan fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Bappeda dalam rangka meningkatkan perannya sebagai fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi,

berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

2. Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

3. Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi dengan kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

4. Religius

Masyarakat yang religius yaitu suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

5. Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala daerah yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021 misi yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi 6, yaitu : "Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih yang meliputi :

a. Tujuan 3 yaitu :

- Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah

b. Sasaran 4 yaitu :

- Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, dan kebijakan

Misi 6 : Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan 3	Sasaran 4	Strategi	Kebijakan
Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Strategi yang berorientasi pada reformasi birokrasi	1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Jangka Menengah daerah. 2. Peningkatan Kualitas Hasil Litbang

C. PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KAB. SINTANG TAHUN 2020

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan

(RKT) dan melalui proses penganggaran yang dapat dijabarkan kembali dalam bentuk :

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Rumusan Indikator

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Sasaran : Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan	Dokumen	Output
2.	Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian	Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian	Aplikasi	Output
3.	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan	Dokumen	Output
4.	Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD	Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD	Persentase	Output

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat SKPD dokumen perjanjian kinerja di buat oleh Kepala SKPD, yang berjanji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD).

Sasaran dan indikator beserta targetnya yang dilaksanakan dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan	1	Dokumen
		Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian	1	Aplikasi
		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan	3	Dokumen
		Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD	85	%

c. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sebagai penjabaran dari sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Tahun 2020
Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan	Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
				Penyusunan RKPD
2		Jumlah Sistem Perencanaan dan pengendalian	Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Perubahan RKPD
				Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pelaporan
3		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang di hasilkan	Program Kerjasama Pembangunan	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penyusunan RKPD
4	Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras dengan RPJMD dan RKPD		Program Kerjasama Pembangunan	Pemutahiran Data Sosio Ekonomi Masyarakat terutama Masyarakat Miskoin dan Rentan Miskin
			Program Perencanaan Pembangunan	Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit
			Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.
			Program Perencanaan Pembangunan	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian.
			Program Perencanaan Pembangunan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.			
Program Perencanaan Sosial Budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social			

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan

indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Range	Penilaian
85 s.d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

Nilai Tengah	Penilaian
92,5%	Sangat Berhasil
77,5%	Berhasil
62,5%	Cukup Berhasil
27,5%	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

$$\text{Rumus} = \frac{(\text{JumlahNilaiKelompokKategori} \times \text{MeanKategori})}{\text{JumlahIndikator}} \times 100\%$$

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*Outcome*).

Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK).

Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besaran dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM.

Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti jumlah laporan hasil bimbingan teknis, LKJIP, Laporan Keuangan, Laporan Hasil Evaluasi, Audit yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator Outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output, antara lain prosentase peningkatan jumlah temuan yang ditindaklanjuti atau prosentase meningkatnya pelayanan pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	140,55%			

Dari sasaran strategis tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sangat berhasil	1	Sasaran	100 (%)
- Berhasil	0	Sasaran	0 (%)
- Cukup Berhasil	0	Sasaran	0 (%)
- Tidak Berhasil	0	Sasaran	0 (%)
Jumlah	1	Sasaran	100 (%)

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada bagian evaluasi kinerja berikut ini

2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja

Sasaran : Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. **4.377.278.189,00** telah terealisasi senilai Rp. **4.283.396.022,00** atau **97,86%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekuser narkoba (P4GN)	35.000.000	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000	2.600.000	2.598.000	99,92
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.440.000	111.424.000	92.192.587	82,74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.390.000	15.390.000	9.072.400	58,95
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.800.000	1.800.000	1.696.500	94,25
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	120.280.500	116.080.500	116.080.500	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.422.150	26.459.950	26.459.950	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.505.000	20.564.566	20.564.566	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.860.000	7.860.000	7.860.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	4.380.000	4.380.000	3.260.000	74,43

	Peraturan Perundang-undangan				
	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000	40.008.000	39.977.000	99,92
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	359.955.000	131.800.000	130.580.018	99,07
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	112.780.000	63.870.000	63.870.000	100
	Penyediaan Tenaga Kontrak	223.762.700	223.762.700	219.212.700	97,97
	Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas	30.004.000	11.956.000	11.952.925	99,97
	Penataan Dokumen Arsip	26.630.000	13.295.000	13.125.000	98,72
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	22.409.400	22.409.400	16.592.437	74,04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	35.580.722	-	-	-
	Pengadaan Meubelair	5.000.000	-	-	-
	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	35.969.500	35.969.500	35.387.000	98,38
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.750.000	31.060.000	28.445.454	91,58
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	46.000.000	59.570.000	59.289.000	99,53
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	87.700.000	94.640.000	94.406.000	99,75
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	12.651.776	12.651.776	11.551.776	91,31

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	97.790.000	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.850.100	6.010.100	5.997.500	99,79
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	5.250.100	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.530.100	4.782.100	4.782.100	100
Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.	349.999.700	199.969.180	199.464.212	99,75
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian.	249.999.980	125.192.980	124.320.499	99,30
	Dana penunjang badan penataan ruang daerah (BKPRD)	64.999.800	25.508.000	25.381.900	99,51
	Koordinasi pembangunan Bandar udara tebelian.	79.999.860	22.531.860	22.376.860	99,31
	Dana penunjang kegiatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman.	149.999.670	39.704.670	39.694.670	99,97
	Pemutahiran data sosio ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan miskin.	-	99.999.200	99.711.700	99,71

Program Perencanaan Pembangunan	Penyelenggaraan musrenbang RKPd.	374.871.600	309.488.600	309.133.600	99,89
	Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.	274.998.760	148.178.760	148.108.760	99,95
	Penyusunan RKPd.	209.999.700	147.749.858	147.694.858	99,96
	Penyusunan perubahan RKPd.	60.575.160	24.259.740	24.259.740	100
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	129.999.840	63.113.940	63.024.240	99,86
	Dana penunjang satuan tugas pendamping RPIJM.	99.999.950	22.124.950	21.582.550	97,55
	Tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.	69.999.910	22.490.040	22.490.040	100
	Pengembangan system informasi manajemen perencanaan dan pelaporan.	389.998.700	239.094.967	238.894.967	99,92
	Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan,	149.999.990	76.938.830	76.797.430	99,82
	Dana penunjang gerakan nasional kemitraan air GN-KPA.	73.836.990	26.483.830	26.448.830	99,87
	Dana penunjang kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman	69.999.540	32.748.500	32.258.500	98,50
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.	290.000.000	120.554.390	120.093.440	99,62
	Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi.	30.000.000	26.316.850	25.961.850	98,65
	Pengendalian	160.000.000	92.446.038	91.307.725	98,77

	inflasi daerah.				
	Kajian hilirisasi produk kelapa sawit.	143.849.438	92.734.174	92.439.174	99,68
	Penyusunan data dan penilaian tanggung jawab social perusahaan.	200.000.000	134.636.790	133.500.790	99,16
	Festival kabupaten lestari.	803.170.000	324.744.600	299.263.174	92,15
Program Perencanaan Sosial Budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial	285.000.000	117.054.000	117.050.100	99,99
	Pembinaan, evaluasi dan pelaporan lintas sektoral	305.195.400	146.417.300	143.994.073	98,34
	Koordinasi dan fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.	145.213.800	54.817.400	52.382.400	95,56
	Kinerja dan ukuntabilitas guru	385.418.000	199.918.000	197.810.150	98,95
	Fasilitasi program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2-EMAS)	200.000.000	108.655.500	108.072.200	99,46
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi pencapaian target rencana aksi daerah pangan dan gizi.	184.479.400	73.773.900	66.715.200	90,43
	Koordinasi dan Fasilitasi pencapaian target SDGs	95.000.000	56.295.400	53.556.957	95,14
Program Peringatan Hari Nasioanl dan Daerah	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	25.000.000	-	-	-
	Pameran Pembangunan	41.750.500	-	-	-
	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
Program Pengembangan Data/Informasi	Update data sistem informasi daerah	119.999.680	56.356.880	56.016.550	99,40

	Database sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan	129.999.700	83.635.470	83.635.470	100
	Total	7.999.646.116	4.377.278.189	4.283.396.022	97,86

Kinerja Sasaran ” Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Sasaran : Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan	Dokumen	1	3	300 %	Output
2	Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian	Aplikasi	1	1	100 %	Output
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan	Dokumen	3	2	66,67 %	Output
4	Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD	%	85	81,19	95,51	Output
Capaian Sasaran					140,55 %	

Dilihat dari capaian indikator sasaran Output yang terdiri dari 4 (Empat) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (140,55%)**, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

3. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan

Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan dan 5 (Lima) Tahunan merupakan penyusunan dokumen yang melandasi jalannya semua kegiatan yang ada di dalam Organisasi Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang merupakan *Leading Sector* penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mana dokumen ini merupakan cikal bakal lahirnya Rencana Strategis (RENSTRA). Pada tahun 2020, kegiatan Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan	Dokumen	1	3	300 %

Dilihat dari capaian yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja output dapat dilihat bahwa Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan sebesar 300% telah melebihi target Renstra sebesar 1 Dokumen. Apabila indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan ini dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		+/-
				2019	2020	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	2	3	+1

	Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan					
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

Sebagaimana data yang terdapat dari tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan pada tahun 2019 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tetap dapat dipertahankan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada telah melebihi target untuk mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan indikator tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. **320.617.260,00** yang telah terealisasi senilai Rp. **320.477.760,00** atau **99,97%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.	274.998.760	148.178.760	148.108.760	99,95
	Penyusunan RKPD	209.999700	148.178.760	148.108.760	99,96
	Penyusunan Perubahan RKPD	60.575.160	24.259.740	24.259.740	100
TOTAL		545.573.620	320.617.260	320.477.260	99,97

4. Indikator Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian

Indikator Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian merupakan pelaksanaan dan penerapan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIMRAL), yang dimana Pemerintah Kabupaten Sintang Bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Aplikasi berbasis Web ini memberikan informasi mengenai perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan APBD Kabupaten Sintang. Pada tahun 2020, pelaksanaan dan penerapan terhadap aplikasi SIMRAL dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian	Aplikasi	1	1	100 %

Dilihat dari capaian yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja output dapat dilihat bahwa Prosentase Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian sebesar 100% telah memenuhi target Renstra sebesar 1 Aplikasi. Apabila indikator Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian ini dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		+/-
				2019	2020	
1	Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian	Aplikasi	1	1	1	0

Sebagaimana data yang terdapat dari tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian pada tahun 2019 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tetap dapat dipertahankan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada tetap konsisten untuk mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan indikator tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. **239.094.967,00** yang telah terealisasi senilai Rp. **238.894.967,00** atau **99,92%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Perencanaan Pembangunan	Pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan dan pelaporan.	389.998.700	239.094.967	238.894.967	99,92
TOTAL		389.998.700	239.094.967	238.894.967	99,92

5. Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan

Indikator jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan adalah jumlah dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan penelaahan berbagai bidang yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang, yaitu masalah di bidang Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Ekonomi serta Perencanaan Sosial Budaya. Pada tahun 2020, kegiatan penyusunan dokumen perencanaan teknis dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan	Dokumen	3	2	66,67 %

Dilihat dari capaian yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja output dapat dilihat sebagai bahwa Prosentase Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan sebesar 66,67% belum memenuhi target Renstra sebesar 3 Dokumen. Dokumen tersebut terdiri dari :

- Dokumen Kerjasama Pembangunan;
- Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan;

Apabila indikator jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan ini dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		+/-
				2019	2020	
1	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan	Dokumen	3	3	2	-1

Sebagaimana data yang terdapat dari tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan pada tahun 2019 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tetap dapat dipertahankan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada belum dapat mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan indikator tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. **192.733.174,00** yang telah terealisasi senilai Rp. **192.150.874,00** atau **99,70%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Kerjasama Pembangunan	Pemutakhiran data sosio ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan miskin	-	99.999.200	99.711.700	99,71
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit	143.849.438	92.734.174	92.439.174	99,68
TOTAL		143.849.438	192.733.174	192.150.874	99,70

6. Indikator Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD

Indikator persentase RENSTRA dan RENJA OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD merupakan hasil perbandingan antara dokumen RENSTRA dan RENJA yang sesuai atau selaras dengan penjabaran di dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten, yang mana urusan maupun kegiatan yang diselenggarakan OPD sesuai dengan Tema RKPD dan Visi Misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih selama periode. Pada tahun 2020, indikator persentase

RENSTRA dan RENJA OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD	%	85	81,19	95,51

Dilihat dari capaian yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja output dapat dilihat bahwa persentase RENSTRA dan RENJA OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD sebesar 81,19% belum memenuhi target Renstra sebesar 85%. Hal ini disebabkan oleh :

- Kurangnya pemahaman OPD akan pentingnya keselarasan antara tugas dan fungsi terhadap visi misi kabupaten;
- Beralihnya nama-nama OPD sehingga merubah dokumen perencanaan;

Apabila capaian Indikator Kinerja persentase RENSTRA dan RENJA OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD pada tahun 2019 maka dapat disajikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		+/-
				2019	2020	
1	Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD	%	85	80,17	81,19	+1,2

Sebagaimana data yang terdapat dari tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja persentase RENSTRA dan RENJA OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD pada tahun 2019 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tetap dapat dipertahankan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada tetap konsisten untuk mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan indikator tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. **625.884.490,00** yang telah terealisasi senilai Rp. **623.952.491,00** atau **99,70%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	349.999.700	199.969.180	199.464.212	99,75
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian	249.999.980	125.192.980	124.320.499	99,30
Program Perencanaan Pembangunan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana	129.999.840	63.113.940	63.024.240	99,86

	pembangunan daerah				
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	290.000.000	120.554.390	120.093.440	99,62
Program Perencanaan Sosial Budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	285.000.000	117.054.000	117.050.100	99,99
TOTAL		1.304.999.520	625.884.490	623.952.491	99,70

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka operasional perkantoran, Bappeda Kabupaten Sintang mendapat anggaran dalam APBD Tahun 2020 sebesar **Rp. 7.762.186.395,32 ,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 7.637.827.715,00,-** atau **98,40%** dari plafond anggaran. Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Belanja Tidak Langsung Bappeda Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
1	Gaji pokok PNS/uang representasi	1.899.065.409,68	1.884.597.020,00	
2	Tunjangan keluarga	206.679.388,29	204.635.072,00	
3	Tunjangan jabatan	183.249.250,00	181.185.000,00	
4	Tunjangan fungsional umum	56.959.050,00	56.180.000,00	
5	Tunjangan beras	102.790.655,20	101.170.740,00	
6	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	5.000.000,00	2.021.655,00	
7	Pembulatan gaji	500.000,00	26.947,00	
8	Jaminan Kesehatan	80.234.105,00	78.129.015,00	
9	Jaminan Kematian	13.169.492,00	11.710.039,00	
10	Jaminan Keselamatan Kerja	5.500.000,00	3.903.365,00	
11	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	831.760.856,15	830.872.840,00	
Jumlah		3.384.908.206,32	3.354.431.693,00	99,10

Tabel 3.3
Belanja Langsung Bappeda Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)			NaN
1	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekuser Narkoba (P4GN)	0,00	0,00	NaN
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	813.660.116,00	775.094.583,00	95,26
2	Penyediaan jasa surat menyurat	2.600.000,00	2.598.000,00	99,92
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	111.424.000,00	92.192.587,00	82,74
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.390.000,00	9.072.400,00	58,95
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.800.000,00	1.696.500,00	94,25
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	116.080.500,00	116.080.500,00	100,00
7	Penyediaan alat tulis kantor	26.459.950,00	26.459.950,00	100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.564.566,00	20.564.566,00	100,00
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.860.000,00	7.860.000,00	100,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.380.000,00	3.260.000,00	74,43
11	Penyediaan makanan dan minuman	40.008.000,00	39.977.000,00	99,92
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	131.800.000,00	130.580.018,00	99,07
13	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	63.870.000,00	63.870.000,00	100,00
14	Penyediaan tenaga kontrak	223.762.700,00	219.212.700,00	97,97
15	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	11.956.000,00	11.952.925,00	99,97
16	Penataan dokumen arsip	13.295.000,00	13.125.000,00	98,72
17	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	22.409.400,00	16.592.437,00	74,04
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	233.891.276,00	229.079.230,00	97,94
18	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	NaN
19	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	NaN
20	Pengadaan perangkat komputer dan printer	35.969.500,00	35.387.000,00	98,38
21	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	31.060.000,00	28.445.454,00	91,58
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.570.000,00	59.289.000,00	99,53
23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	94.640.000,00	94.406.000,00	99,75
24	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	12.651.776,00	11.551.776,00	91,31
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0,00	0,00	NaN

25	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	Nan
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.792.200,00	10.779.600,00	99,88
26	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.010.100,00	5.997.500,00	99,79
27	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	0,00	NaN
28	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.782.100,00	4.782.100,00	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	139.992.350,00	139.652.020,00	99,76
29	Update data Sistem Informasi Profil Daerah	56.356.880,00	56.016.550,00	99,40
30	Database Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan	83.635.470,00	83.635.470,00	100,00
	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	512.905.890,00	510.949.841,00	99,62
31	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	199.969.180,00	199.464.212,00	99,75
32	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian	125.192.980,00	124.320.499,00	99,30
33	Dana penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	25.508.000,00	25.381.900,00	99,51
34	Koordinasi pembangunan Bandar Udara Tebelian	22.531.860,00	22.376.860,00	99,31
35	Dana penunjang kegiatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman	39.704.670,00	39.694.670,00	99,97
36	Pemuthakiran Data Sosio Ekonomi Masyarakat Terutama Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	99.999.200,00	99.711.700,00	99,71
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.112.672.015,00	1.110.693.515,00	99,82
37	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	309.488.600,00	309.133.600,00	99,89
38	Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD	148.178.760,00	148.108.760,00	99,95
39	Penyusunan RKPD	147.749.858,00	147.694.858,00	99,96
40	Penyusunan Perubahan RKPD	24.259.740,00	24.259.740,00	100,00
41	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	63.113.940,00	63.024.240,00	99,86
42	Dana penunjang satuan tugas pendamping RPIJM	22.124.950,00	21.582.550,00	97,55
43	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	22.490.040,00	22.490.040,00	100,00
44	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pelaporan	239.094.967,00	238.894.967,00	99,92
45	Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan	76.938.830,00	76.797.430,00	99,82
46	Dana penunjang gerakan nasional kemitraan air GN-KPA	26.483.830,00	26.448.830,00	99,87
47	Dana penunjang kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman	32.748.500,00	32.258.500,00	98,50
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	791.432.842,00	762.566.153,00	96,35
48	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	120.554.390,00	120.093.440,00	99,62
49	Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi	26.316.850,00	25.961.850,00	98,65
50	Pengendalian inflasi daerah	92.446.038,00	91.307.725,00	98,77

51	Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit	92.734.174,00	92.439.174,00	99,68
52	Penyusunan Data dan Penilaian Tanggungjawab Sosial Perusahaan	134.636.790,00	133.500.790,00	99,16
53	Festival kabupaten lestari	324.744.600,00	299.263.174,00	92,15
	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	756.931.500,00	739.581.080,00	97,71
54	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	117.054.000,00	117.050.100,00	100,00
55	Pembinaan, evaluasi dan pelaporan lintas sektoral	146.417.300,00	143.994.073,00	98,34
56	Koordinasi dan fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan	54.817.400,00	52.382.400,00	95,56
57	Kinerja dan akuntabilitas guru	199.918.000,00	197.810.150,00	98,95
58	Fasilitasi Program Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (P2-EMAS)	108.655.500,00	108.072.200,00	99,46
59	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	73.773.900,00	66.715.200,00	90,43
60	Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs	56.295.400,00	53.556.957,00	95,14
	PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
61	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	0,00	0,00	
62	Pameran pembangunan	0,00	0,00	
63	Peringatan hari besar nasional dan daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Jumlah		4.377.278.189,00	4.283.396.022,00	97,86

a. Anggaran dan Realisasi Program dan Sasaran Strategis Tahun 2020

Upaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan keberhasilan visi dan misi dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 dilaksanakan dengan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **1.378.329.891,00** dari target sebesar Rp. **1.375.475.592,00** atau 99,82% dengan kriteria sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan rancangan teknokratik	274.998.760	148.178.760	148.108.760	99,95

	RPJMD.				
	Penyusunan RKPD	209.999700	148.178.760	148.108.760	99,96
	Penyusunan Perubahan RKPD	60.575.160	24.259.740	24.259.740	100
TOTAL		545.573.620	320.617.260	320.477.260	99,97
Program Perencanaan Pembangunan	Pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan dan pelaporan.	389.998.700	239.094.967	238.894.967	99,92
TOTAL		389.998.700	239.094.967	238.894.967	99,92
Program Kerjasama Pembangunan	Pemutakhiran data sosio ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan miskin	-	99.999.200	99.711.700	99,71
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit	143.849.438	92.734.174	92.439.174	99,68
TOTAL		143.849.438	192.733.174	192.150.874	99,70
Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	349.999.700	199.969.180	199.464.212	99,75
	Koordinasi perencanaan pembangunan	249.999.980	125.192.980	124.320.499	99,30

	bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian				
Program Perencanaan Pembangunan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	129.999.840	63.113.940	63.024.240	99,86
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	290.000.000	120.554.390	120.093.440	99,62
Program Perencanaan Sosial Budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	285.000.000	117.054.000	117.050.100	99,99
TOTAL		1.304.999.520	625.884.490	623.952.491	99,70
SUB TOTAL		2.384.421.278	1.378.329.891	1.375.475.592	99,82

b. Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja

Aspek efisiensi dalam suatu organisasi perangkat daerah sangat penting mengingat tantangan kerja yang semakin beragam dan menuntut setiap tahunnya. Menjadi suatu hal yang mendasar bahwa dalam setiap perencanaan kegiatan maupun program telah diperhitungkan dengan baik agar target yang ditetapkan dapat terwujud. Dalam hal ini, BAPPEDA Kabupaten Sintang berkomitmen dalam setiap

indikator kinerja pada tahun anggaran 2020 dapat mencapai target RENSTRA 2017-2021. Data ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)
Sasaran : Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan	1 Dokumen	300	320.617.260	99,97
2	Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian	1 Aplikasi	100	239.094.967	99,92
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan	3 Dokumen	66,67	192.733.174	99,70
4	Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD	85%	95,51	625.884.490	99,70
Capaian Sasaran			140,55	1.378.239.891	99,82

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara capaian kinerja dalam mewujudkan sasaran dengan realisasi anggaran program serta sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Sintang tahun 2020 sangat berhasil. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keselarasan antara realisasi anggaran terhadap kinerja yang selisihnya hanya 1 (satu) persen. Meskipun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkendala dalam jumlah anggaran dan lain-lain di masa pandemi COVID-19, BAPPEDA Kabupaten Sintang tetap mampu mewujudkan sasaran dengan kategori sangat berhasil.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan Bappeda di Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya *good and clean governance*, melalui :
 - Melakukan review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sintang setiap tahun untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas instansi pemerintah.
 - Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dalam pelaksanaan program-program.
 - Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.
 - Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Untuk itu beragam informasi dan

indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi akan lebih diberdayagunakan.

2. Langkah - langkah operasional yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efektifitas penyusunan kebijakan daerah.
- Meningkatkan kompetensi tenaga perencana daerah.
- Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.
- Mengembangkan sistem pelayanan administratif dan teknis.
- Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lain.
- Meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- Menerapkan pola perencanaan partisipasif.
- Mengoptimalkan fungsi konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan.
- Menerapkan aplikasi sistem teknologi informasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

Sasaran : Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.	274.998.760	148.178.760	148.108.760	99,95
	Penyusunan RKPD	209.999700	148.178.760	148.108.760	99,96
	Penyusunan Perubahan RKPD	60.575.160	24.259.740	24.259.740	100
TOTAL		545.573.620	320.617.260	320.477.260	99,97
Program Perencanaan Pembangunan	Pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan dan pelaporan.	389.998.700	239.094.967	238.894.967	99,92
TOTAL		389.998.700	239.094.967	238.894.967	99,92
Program Kerjasama Pembangunan	Pemutakhiran data sosio ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan miskin	-	99.999.200	99.711.700	99,71
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit	143.849.438	92.734.174	92.439.174	99,68
TOTAL		143.849.438	192.733.174	192.150.874	99,70

Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	349.999.700	199.969.180	199.464.212	99,75
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian	249.999.980	125.192.980	124.320.499	99,30
Program Perencanaan Pembangunan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	129.999.840	63.113.940	63.024.240	99,86
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	290.000.000	120.554.390	120.093.440	99,62
Program Perencanaan Sosial Budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	285.000.000	117.054.000	117.050.100	99,99
TOTAL		1.304.999.520	625.884.490	623.952.491	99,70
SUB TOTAL		2.384.421.278	1.378.329.891	1.375.475.592	99,82



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jalan M. Saad Sintang 78611 Telp. (0565) 21645 Fax. (0565) 21294

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTIYUS, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M. Med, PH

Jabatan : BUPATI SINTANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

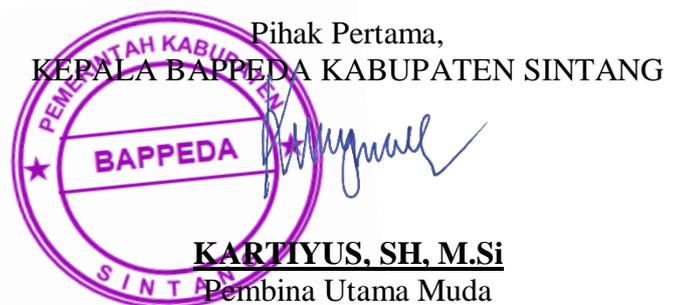
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2020



Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG
dr. H. JAROT WINARNO, M. Med, PH



Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG
KARTIYUS, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680826 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan	1
		Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian	1
		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan	3
		Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD	85 %

I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp	1.222.218.750,00	APBD
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp	277.651.998,00	APBD
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp	97.790.000,00	APBD
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp	18.630.300,00	APBD
V	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	Rp	249.999.380,00	APBD
VI	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Rp	894.999.010,00	APBD
VII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	1.904.280.140,00	APBD
VIII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Rp	1.627.019.438,00	APBD
IX	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Rp	1.600.306.600,00	APBD
X	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Rp	35.000.000,00	APBD
XI	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH	Rp	66.850.500,00	APBD
TOTAL		Rp	7.999.646.116,00	



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH

Sintang, Januari 2020

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG



KARTIYUS, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680826 199303 1 004

